

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan sebagai industri pelayanan dan jasa yang akan menjadi andalan Indonesia sebagai pemasukan keuangan bagi negara. Kekayaan alam, seni budaya, tradisi masyarakat yang di miliki Indonesia berbagai macam keragaman keindahan, keunikan dan keanekaragaman potensi kepariwisataan berupa berbagai fasilitas yang dimiliki suatu daerah dapat menjadi modal untuk mengembangkan kepariwisataan untuk kemajuan daerah tersebut. (Denny,2013)

Peran pemerintah di negara-negara berkembang harus fokus pada kebijakan ekonomi untuk mempromosikan pariwisata sebagai sumber potensi pertumbuhan ekonomi (Ekanayake,2012:1), sedangkan menurut Binss et al 2002;1, juga menambahkan kegiatan mempromosikan potensi pariwisata suatu daerah, dapat dijadikan sebagai strategi kunci dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah.

Salah satu daerah yang memiliki berbagai macam keindahan alam dan tempat yang menarik untuk di kunjungi yaitu DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Oleh karena itu pengelolaan sumber daya yang baik akan dapat menunjang pendapatan setiap daerah yang terdiri dari Kulonprogo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kota yang berada di Yogyakarta

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di pusat tempat pariwisata yang memiliki khas yang berbeda.

Otonomi daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada pacuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Pariwisata berbagai macam ragam yang melimpah di Yogyakarta saat ini telah tumbuh seiring berjalannya waktu. Hal ini tak lepas dari semakin gencarnya pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengeksplorasi serta mempromosikan obyek-obyek wisata yang mampu berkontribusi meningkatkan keuntungan bagi wilayah sekitarnya. Hal ini sejalan dengan konstitusi UU No.9 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa “Keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperluas kesempatan kerja”.

Adapun pengertian pariwisata itu sendiri adalah **perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam**

dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. (H.Kodhyat (1983:4)).

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara, tanpa terkecuali di Indonesia, karena itu menurut IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*) ada delapan alasan utama setiap negara wajib mengembangkan pariwisata seperti berikut ini: (1) Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun international. (2) Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya. (3) Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi. (4) Pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi. (5) Penghasil devisa. (6) Pemicu perdagangan international. (7) Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan (8) Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.

Peran serta masyarakat diharapkan mempunyai andil yang sangat besar dalam proses ini. Untuk itu masyarakat di tempatkan pada posisi memiliki, mengelola, merencanakan dan memutuskan tentang program yang melibatkan kesejahteraannya (Korten, 1984 dalam Kusmayadi dan Ervina, 1999).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang cukup banyak di minati wisatawan. Tercatat sejumlah wisatawan, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung di Yogyakarta.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata (arrival)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013

Tahun	Wisman (jiwa)	Wisnus (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2009	139.492	1.286.565	1.426.057	-
2010	152.843	1.304.137	1.456.980	2.17
2011	169.565	1.438.129	1.607.694	10.34
2012	197.751	2.162.422	2.360.173	46.80
2013	207.278	3.603.366	3.810.644	61.45

Sumber : diolah dari Statistik Kepariwisataan DIY, 2014

Dari tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan dari Tahun 2009-2013. Meningkatnya pariwisata di Yogyakarta mengalami dampak yang bagus untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pariwisata di daerah Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kota madya yang memiliki beragam macam pariwisata dari alam secara langsung ataupun buatan yang di kelola ulang oleh masyarakat setempat yang menarik untuk di kunjungi wisatawan agar memajukan perekonomian di kabupaten masing-masing melalui bidang pariwisata.

Dilihat dari Landasan yuridis dalam pembangunan pariwisata Yogyakarta adalah Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DIY tahun 2012-2015. Berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berpariwisata. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka jelas bahwa budaya dan alam merupakan potensi utama dalam pariwisata.

Dengan melihat pada kenyataan maka tak dapat dipungkiri lagi, Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi. Potensi tersebut berupa:

1. Memiliki posisi strategis, berada di tengah Pulau Jawa dan mudah di jangkau.
2. Terdapat kompleks kebudayaan Budha, Hindhu, dan Islam dalam lokasi yang berdekatan sehingga menempatkan Yogyakarta sebagai kawasan strategis kepariwisataan Nasional berbasis heritage.
3. Memiliki nilai historis kuat dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia.
4. Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman dengan budaya dan adat jawanya yang adiluhung, mengakar kuat di masyarakat.

5. Masyarakat Yogyakarta dikenal ramah, terbuka, rata-rata memiliki tingkat pendidikan dan skill tinggi, menguasai teknologi, kreatif dan inovatif.
6. Memiliki keragaman produk pariwisata (sejarah, edu, budaya, alam, buatan, sarana MICE, belanja serta keunikan kuliner), dengan fasilitas yang cukup lengkap.

Salah satu Kabupaten yang berada di DIY yaitu Gunung Kidul, sumbangan sektor jasa /pariwisata dari tahun selalu meningkat selama kurun waktu 2011-2013 dari 4,56% pada tahun 2011 menjadi 5,77% pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 7,98 pada tahun 2013. Dari kecenderungan peningkatan kontribusi tersebut, dapat menjadi salah satu indikator bahwa sektor jasa pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul akan menjadi sektor andalan di masa yang akan datang.

Indikator lain perkembangan sektor pariwisata adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Dari tahun 2009-2013, kunjungan wisatawan ke kabupaten Gunung Kidul juga senantiasa meningkat:

Tabel. 1.2
Data Jumlah Kunjungan Wisatawan
Di Kabupaten Gunungkidul 2009-2013

No	Tahun	WISATAWAN		
		M mancanegara	Nusantara	Jumlah
1	2009	267	529.274	529.541
2	2010	585	548.272	548.857
3	2011	1.299	615.397	616.696
4	2012	1.800	998.587	1.000.387
5	2013	3.751	1.333.687	1.337.438

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, 2014

Dari tabel 1.2 menjelaskan bahwa pariwisata di daerah Kabupaten Gunung Kidul mengalami peningkatan yang signifikan, maka dari itu Gunung Kidul memiliki potensi yang lebih baik untuk mengembangkan pariwisata yang berdominan dengan pantai yang patut di lestarikan untuk jadikan tempat wisata dan memajukan perekonomian Gunung Kidul salah satunya dari pendapatan kunjungan wisatawan yang disebut retribusi yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Sedangkan di sektor pariwisata di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16,54 % terhadap PAD Sleman pada tiap tahunnya. Selama 3 (tiga) tahun terakhir,yakni tahun 2011, 2012, dan 2013 secara berturut sektor pariwisata menyumbang sebesar Rp.38,94 Milyar, Rp.53,89 Milyar dan Rp. 68,63 Milyar. Adapun jumlah wisatawan yang berkunjung ke

Sleman pada tahun 2011 tercatat 3,27 juta wisatawan, tahun 2012 tercatat 3,41 juta wisatawan dan tahun 2013 tercatat 3,61 juta wisatawan.

Indikator lain perkembangan sektor pariwisata adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Dari tahun 2009-2013, kunjungan wisatawan ke kabupaten Sleman juga senantiasa meningkat:

Tabel. 1.3
Data Jumlah Kunjungan Wisatawan
Di Kabupaten Sleman 2009-2013

No	Tahun	WISATAWAN		
		Mancanegara	Nusantara	Jumlah
1	2009	421.086	1.647.807	2.068.893
2	2010	142.412	2.357.465	2.499.877
3	2011	255.167	2.234.896	2.234.896
4	2012	262.916	2.779.316	3.042.232
5	2013	339.832	3.314.313	3.654.145

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, 2014

Dari tabel 1.3 menjelaskan bahwa tingkat jumlah kunjungan wisatawan di Sleman mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun ini membuktikan bahwa daya tarik wisata cukup kuat, walaupun Sleman lebih unggul dari pada kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo dikarenakan Sleman didukung oleh Hotel dan Restoran yang melengkapi sarana pariwisata bagi wisatawan ingin bermalam untuk menikmati wisata di Sleman tersebut.

Pariwisata di daerah Kabupaten Bantul yang tidak kalah menariknya dari kabupaten-kabupaten lainnya yang memiliki beberapa pantai, dan tempat wisata lainnya dimana memiliki peluang besar untuk memajukan perekonomian di daerah Bantul dengan menarik minat wisatawan untuk menikmati suasana keindahan yang dimiliki Bantul.

Pariwisata memiliki dampak positif, antara lain menghasilkan perluasan kesempatan kerja/usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan perolehan devisa. Sedangkan, dampak negatif pariwisata antara lain komersialisasi budaya, kebocoran devisa, kerusakan lingkungan. Dalam upaya meminimalisasi dampak negatif lahirnya pemikiran untuk mengembangkan pariwisata yang lebih berpihak pada masyarakat di sekitar objek wisata kemudian dikenal dengan pariwisata berbasis komunitas/masyarakat.

Indikator lain perkembangan sektor pariwisata adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Dari tahun 2009-2013, kunjungan wisatawan ke kabupaten Bantul juga senantiasa meningkat:

Tabel. 1.4
Data Jumlah Kunjungan Wisatawan
Di Kabupaten Bantul 2009-2013

No	Tahun *	WISATAWAN		
		Mancanegara	Nusantara	Jumlah
1	D2009	568	1.447.546	1.447.546
2	2010 a	13.387	1.286.655	1.300.042
3	2011	-	2.378.209	2.378.209
4	^s 2012	-	2.378.209	2.378.209
5	S2013	-	2.037.874	2.037.874

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, 2014

Dari tabel 1.4 diatas menjelaskan bahwa mengalami fluktuatif, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami penurunan, pada tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan tetapi wisatawan di mancanegara mengalami penurunan sedangkan di tahun 2013 mengalami penurunan.

Sedangkan untuk daerah Kabupaten Kulonprogo daerah di mana yang masih kurangnya perhatian untuk memajukan fasilitas pariwisata yang lebih baik. Banyak obyek wisata yang menarik untuk wisatawan kunjungi, karena kurangnya promosi dan fasilitas yang tidak mendukung membuat daya tarik wisatawan tidak seperti 3 (tiga) Kabupaten lainnya. Ketika pemerintah daerah ingin memperbaiki maka akan terjadi perubahan baik dari perekonomian di Kulon Progo, obyek wisatanya banyak dikenal baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri.

Perkembangan sektor pariwisata adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Dari tahun 2009-2013, kunjungan wisatawan ke kabupaten Kulonprogo juga senantiasa meningkat.

Tabel. 1.5
Data Jumlah Kunjungan Wisatawan
Di Kabupaten Kulon Progo 2009-2013

No	Tahun *	WISATAWAN		
		Mancanegara	Nusantara	Jumlah
1	2009	133	433.525	433.658
2	2010	18.358	425.767	444.125
3	2011	1.054	545.743	546.797
4	2012	705	595.824	596.529
5	2013	-	603.878	603.878

Sumber :Dinas Potensi Kebudayaan dan Kepariwisata, 2014

Dari tabel 1.5 diatas menjelaskan bahwa Kulonprogo mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi dilihat dari beberapa tabel yang sudah dijelaskan diatas bahwa Kulonprogo jumlah pariwisatanya paling kecil dari 3 kabupaten 1 kota.

Alasan mengambil pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah penelitian karena kondisi Alam yang menarik dan memiliki potensi cukup besar untuk kemajuan di daerah Yogyakarta dan dalam sistem pengelolaan obyek wisata tersebut di pegang oleh masyarakat setempat melalui beberapa pokdarwis yang ada di sekitar obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik pengunjung yang akan

penulis tuangkan dalam sebuah proposal dengan judul “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETRIBUSI DI SEKTOR PARIWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**”

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar ruang lingkup permasalahan di dalam penelitian ini tidak menjadi luas maka penulis hanya membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di 5 kabupaten yaitu Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul, Yogyakarta
2. Pendapatan pariwisata atau retribusi, jumlah pengunjung, belanja daerah di sektor pariwisata, dan PDRB.
3. Mengambil perbandingan data tahun anggaran 2008-2014 berdasarkan realisasi penerimaan sektor pariwisata.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan urian di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap retribusi pariwisata di DIY?
2. Bagaimana pengaruh jumlah pengunjung pariwisata terhadap retribusi pariwisata di DIY?
3. Bagaimana pengaruh belanja daerah di sektor pariwisata terhadap retribusi pariwisata di DIY?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh PDRB dalam retribusi pariwisata di DIY.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah pengunjung pariwisata dalam retribusi pariwisata di DIY.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh belanja daerah di sektor pariwisata dalam retribusi pariwisata di DIY.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang penerimaan sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Merupakan bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dalam menentukan kebijaksanaan yang berakibat dalam mengoptimalkan penerimaan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penunjang Pendapatan Asli Daerah.
2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan untuk menyusun kebijakan pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.